

Volume 6. Nomor 2 Oktober 2016

DINAMIKA GOVERNANCE

Merupakan terbitan berkala enam bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan dibidang Ilmu Administrasi Negara, berkaitan dengan Dinamika Governance; untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif dan efisien.

Penanggung Jawab

Dr. Ertien Rining Nawangsari. M.Si
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur

Penyunting/ Editor

Dr. Diana Hertati. M.Si
Dr. Agus Widiyarta. M.Si

Redaktur

Tukiman. S.Sos. M.Si

Desain Grafis

Dr. Lukman Arif. M.Si

Sekretariat

Dra. Sri Wibawani. M.Si
Dra. Susi Hardjati. M.Ap

Alamat Redaksi

Prodi Ilmu Administrasi Negara –FISIP
UPN “VETERAN” JAWA TIMUR

JURNAL DINAMIKA GOVERNANCE

Volume 6 Nomor 2 Oktober 2016

DAFTAR ISI

1. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI DAN EDUKASI KONSUMEN CERDAS DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR.
Ary Setyo Wicaksono dan Sri Wibawani.....111
2. PERAN PUSKESMAS MEDOKAN AYU KOTA SURABAYA DALAM PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)
Ika Ayu Utami dan Ertien Rining N.....127
3. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI DI KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA)
Lucy Alif Pravitasari Dan Lukman Arif.....139
4. IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN BANK SAMPAH (STUDI DI BANK SAMPAH “SALING ASIH” DESA LARANGAN KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO)
Teresia Retno Aryanti dan Tukiman.....147
5. PENGGUNAAN PROGRAM SSW (PERIZINAN ONLINE) SEBAGAI UPAYA UNTUK MENEKAN KOLUSI, NEPOTISME, DAN KORUPSI DALAM PROSES PERIZINAN DI KOTA SURABAYA
Agus Widiyarta, Catur Suratnoaji, Sumardjijati.....161
6. PENGARUH DISIPLIN PEGAWAI TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI PD BPR BANK DAER AHLAMONGAN
Agrinata Thresna Zanu ar Attabik dan Pudjoadi.....172
7. KUALITAS PELAYANAN PERUM DAMRI PEMERINTAH KOTA SURABAYA (STUDY KASUS TRANSPORTASI PADA BUS TRANS SIDOARJO)
Dewangga Putra Pratama dan Agus Widiyarta.....182
8. KUALITAS LAYANAN DAN PERATURAN PAJAK DAERAH TERHADAP TINGKAT KEOPUAN SERTA SIKAP PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK
Rusdi Hidayat Nugroho.....191
9. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
Indah Prabawati, Meirinawati.....203

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

Indah Prabawati, Meirinawati
Jurusan Administrasi Publik Universitas Negeri Surabaya
Email: prabawatiindah@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pembangunan desa merupakan seluruh kegiatan yang berlangsung di pedesaan, meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong masyarakat. Dalam rangka pembangunan desa, diperlukan pengorganisasian yang dapat menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, serta melaksanakan administrasi pemerintahan desa. Dalam penyelenggaraan pembangunan desa, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi. Partisipasi merupakan peran serta warga desa baik dalam merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan maupun dalam menerima hasil-hasil pembangunan. Partisipasi merupakan peran serta warga desa baik dalam merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan maupun dalam menerima hasil-hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat bisa juga dianggap sebagai tolok ukur dalam menilai apakah proyek yang bersangkutan merupakan proyek pembangunan desa atau bukan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu 1). Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi, 2). Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, 3) Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam sebagai berikut : 1) Partisipasi dalam bentuk pengambilan keputusan

Kata Kunci: partisipasi masyarakat, pembangunan desa

ABSTRACT

An entire village development activities that take place in rural areas, covering all aspects of society, be done in concert with developing self-help mutual help. In the framework of rural development, the necessary organization to mobilize the community to participate in rural development, as well as the administration of the village administration. In the implementation of rural development, the community has the right to participate. Participation is a good participation of villagers in planning, implementing, accountable and in accepting the results of the participation of development is the participation of the villagers either in planning, implementing, accountable and in accepting the fruits of development. Public participation could also be considered as benchmarks to assess whether the project in question is a village development project or not. Community participation in development, is largely determined by three main elements, namely 1). The existence of the opportunity given to the public to participate, 2). The willingness of society to participate, 3) The ability of the community to participate. The form of public participation in the following: Participation in the form of decision-making.

Keywords: community participation, rural development

PENDAHULUAN

Pembangunan pedesaan dewasa ini mampu membawa Bangsa Indonesia meraih keberhasilan dalam pembangunan fisik. Dalam penyelenggaraan pembangunan desa, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi. Masyarakat dapat memanfaatkan potensi desa maupun peluang yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Masyarakat desa dianggap dapat memahami permasalahan dan kebutuhan mereka. Akan tetapi seringkali yang terjadi masyarakat kurang peduli terhadap pembangunan desanya. Selain itu, pembangunan pedesaan di Indonesia dipandang kurang didasarkan pada upaya untuk mengembangkan kapasitas penduduk sebagai individu dan bagian dari suatu komunitas.

Kondisi masyarakat pedesaan yang semakin berkembang seperti sekarang ini, pemerintah desa merupakan penggerak utama pembangunan pedesaan. Dalam rangka mempercepat pembangunan pedesaan, tidak hanya mengandalkan peran pemerintah desa tetapi juga dibutuhkan kerjasama dengan masyarakat. Dengan partisipasi aktif masyarakat desa, pembangunan desa di Indonesia dapat dilakukan secara optimal

PARTISIPASI MASYARAKAT

Perkembangan kehidupan manusia yang makin meningkat membawa akibat berkembangnya pembangunan yang merupakan sarana manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pembangunan bersifat berhubungan satu sama lain sebagai satu kesatuan. Untuk itu perlu

diusahakan oleh pemerintah bagaimana mengupayakan dan mengembangkan suatu pola pembangunan daerah yang makin meluas dan melibatkan semua kekuatan yang ada dalam masyarakat, karena potensi-potensi yang ada dalam masyarakat tersebut akan merupakan salah satu kekuatan yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan di era otonomi ini.

Istilah partisipasi menurut Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2013) adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Keikutsertaan tersebut dilaksanakan sebagai akibat adanya interaksi sosial antara individu dengan anggota masyarakat yang lain (Raharjo, 2004). Sebagai suatu kegiatan, menurut Verhangen dalam Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2013) partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berhubungan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab dan manfaat. Adanya interaksi dan komunikasi didasarkan pada kesadaran yang dipunyai yang bersangkutan tentang :

1. Kondisi yang tidak memuaskan yang harus diperbaiki
2. Perbaikan kondisi tersebut melalyu kegiatan manusia atau masyarakat sendiri
3. Kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan yang bisa dilaksanakan
4. Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan bantuan yang berguna untuk kegiatan yang bersangkutan

Sedangkan Hoofsteede dalam Khairuddin (2003) menjelaskan

bahwa partisipasi didefinisikan ambil bagian dalam satu tahap atau lebih dari suatu proses pembangunan. Hal ini berarti bahwa terdapat tiga hal pokok, yaitu:

1. Partisipasi merupakan keterlibatan mental emosional;
2. Partisipasi menghendaki adanya kontribusi terhadap kepentingan atau tujuan kelompok;
3. Partisipasi merupakan tanggungjawab terhadap kelompok.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi merupakan peran serta warga desa baik dalam merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan maupun dalam menerima hasil-hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat bisa juga dianggap sebagai tolok ukur dalam menilai apakah proyek yang bersangkutan merupakan proyek pembangunan desa atau bukan.

Wilcox dalam Mardikanto dan Soebiato (2013) mengemukakan tentang tingkatan atau tahapan partisipasi masyarakat, yang terdiri dari:

1. Memberikan informasi (*Information*)
2. Konsultasi (*consultation*), yaitu menawarkan pendapat sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
3. Pengambilan Keputusan bersama (*deciding together*) dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta

mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.

4. Bertindak bersama (*acting together*), hal ini tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.
5. Memberikan dukungan (*supporting independent community interest*), dalam hal ini kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan, terdapat kesukarelaan masyarakat untuk melibatkan diri dalam pembangunan. Dusseldorp dalam Mardikanto dan Soebiato (2013) membedakan beberapa jenjang kesukarelaan yaitu:

1. Partisipasi spontan, ialah peran serta yang tumbuh karena motivasi intrinsik berupa pemahaman, penghayatan, dan keyakinan sendiri
2. Partisipasi terinduksi, ialah peran serta yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik, yang berupa bujukan, pengaruh, dorongan dari luar, walaupun mempunyai kebebasan untuk berpartisipasi
3. Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, yaitu peran serta yang tumbuh karena adanya tekanan yang dirasakan masyarakat pada umumnya, atau peran serta dalam mematuhi kebiasaan, nilai dan

norma yang dianut dalam suatu masyarakat

4. Partisipasi tertekan oleh alasan sosial ekonomi ialah peran serta yang dilaksanakan karena takut akan kehilangan status social atau menerima kerugian
5. Partisipasi tertekan oleh peraturan, adalah peran serta yang dilaksanakan karena takut mendapat hukuman atas peraturan yang berlaku

Pendapat lain dikemukakan oleh Raharjo (2004) yang mengatakan lagwa ada tiga variasi bentuk partisipasi, adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi terbatas adalah partisipasi yang hanya digerakkan untuk kegiatan tertentu yang dianggap menimbulkan kerawanan bagi stabilitas nasional dan kalangan pembangunan
2. Partisipasi penuh, yaitu partisipasi seluas-luasnya dalam aspek kegiatan pembangunan.
3. Mobilisasi tanpa partisipasi, artinya partisipasi yang dibangkitkan oleh pemerintah tetapi masyarakat tidak diberi kesempatan untuk mempertimbangkan kepentingan pribadi dan tidak diberi kesempatan turut mengajukan tuntutan maupun mempengaruhi penyelenggaraan kebijakan

PEMBANGUNAN DESA

Berjalannya suatu kegiatan sangat dipengaruhi oleh pengorganisasian, sistem kerja, dan unsur-unsur pendukungnya, termasuk

personilnya baik secara kuantitas maupun kualitasnya, serta sarana dan prasarana yang diperlukan. Bila hal tersebut dapat dipenuhi maka akan dapat tercapai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien.

Pembangunan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Hal ini seperti pendapat Kartasasmita dalam Mardikanto dan Poerwoko Soebianto (2013) yang mengatakan bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam arti yang luas. Pendapat lain menurut Raharjo (2004) mengungkapkan bahwa pembangunan mempunyai arti perubahan yang disengaja atau direncanakan dengan tujuan untuk merubah keadaan yang tidak dikehendaki menjadi keadaan yang dikehendaki.

Tidak berbeda dengan pembangunan desa yang berdasar dari, oleh dan untuk seluruh masyarakat desa dengan melibatkan masyarakat desa. Menurut pendapat Sumpeno (2011) pendekatan menyeluruh yang dipakai dalam pelaksanaan pembangunan, meliputi :

1. Perumusan kebijakan dan pendekatan pembangunan yang berupaya untuk meletakkan kembali format, tatanan serta kelembagaan masyarakat desa.
2. Menggunakan pengalaman pembangunan dimasa lalu untuk memaksimalkan upaya menyelesaikan masalah pembangunan melalui penyusunan suatu kebijakan perencanaan yang berdifat

umum serta dilaksanakan seraca sama.

Menurut Nasikun (2000) prinsip dalam pembangunan yang utama dilaksanakan atas dasar inisiatif dan dorongan kepentingan masyarakat, dalam hal ini masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat didalam pembangunan. Pendapat Tjokrowinoto dalam Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2013) mengatakan ciri-ciri pembangunan yang berpusat pada rakyat yaitu :

1. Prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri
2. Fokus utama adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasi sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka
3. Menoleransi variasi lokal dan bersigat fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lokal
4. Menekankan proses *social learning* yang di dalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan berdasar pada saling belajar.
5. Proses pembentukan jejaring (*networking*) antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat, satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri, merupakan bagian integral dari pendekatan ini,

baik untuk meningkatkan kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengelola berbagai sumber maupun untuk menjaga keseimbangan antara struktur vertikal maupun horizontal.

Menurut Marbun (2002) bahwa pembangunan desa adalah seluruh kegiatan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong masyarakat. Dalam konteks pembangunan desa, diperlukan pula pengorganisasian yang nantinya dapat menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, serta melaksanakan administrasi pemerintahan desa

Pembangunan desa merupakan upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa serta mempercepat pembangunan perekonomian daerah yang efektif dan kokoh (Adisasmita, 2006). Pendapat Adisasmita (2006) menjelaskan prinsip-prinsip pokok dalam pembangunan desa, adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu pada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan tersebut yaitu :
 - a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
 - b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

- c. Stabilitas yang sehat dan dinamis diterapkan disektor termasuk desa dan kota. Di setiap wilayah dan antar wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu
2. Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip berkelanjutan. Penerapan prinsip berkelanjutan mensyaratkan setiap daerah lebih mengutamakan sumber-sumber alam yang terbaharui sebagai sumber pertumbuhan. Setiap desa menggunakan sumber daya manusia secara luas, memanfaatkan modal fisik, prasarana mesin-mesin dan peralatan dengan secara efisien.
3. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, debirokratisasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

Penyelenggaraan pembangunan desa diarahkan untuk menggunakan secara optimal sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang tersedia. Potensi sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang terdapat di lokasi dimana desa tersebut berada sedangkan pemanfaatan potensi sumber daya manusia dapat dikembangkan melalui peningkatan kualitas hidup, peningkatan keterampilan, peningkatan prakarsa, dengan mendapatkan bimbingan dan bantuan dari pemerintah, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Penerapan pembangunan desa dibutuhkan kerjasama yang erat antar daerah satu dengan daerah lainnya dalam satu wilayah dan antar satu wilayah. Pembangunan desa dilaksanakan dengan pendekatan secara multisektoral, partisipatif, berkelanjutan serta melakukan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara serasi dan selaras serta sinergis yang akan tercapai optimalisasi.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

Partisipasi masyarakat merupakan sesuatu yang harus ditumbuhkan dalam proses pembangunan desa. Agar tercipta partisipasi masyarakat maka pemerintah dalam hal ini harus memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa. Menurut pendapat Slamet dalam Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2013) mengatakan bahwa untuk tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu :

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi
Berbicara kesempatan adalah sebagai berikut :
 - a. Kemauan politik dari penguasa untuk mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan
 - b. Kesempatan untuk mendapatkan informasi pembangunan

- c. Kesempatan menggunakan sumber daya untuk pelaksanaan pembangunan
 - d. Kesempatan mendapat dan memakai teknologi yang sesuai
 - e. Kesempatan berorganisasi
 - f. Kesempatan mengembangkan kepemimpinan yang dapat menumbuhkan, menggerakkan dan mengembangkan serta memelihara partisipasi masyarakat
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi
- Kemauan merujuk pada :
- a. Sikap untuk meniadakan nilai-nilai yang menghambat pembangunan
 - b. Sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan pada umumnya
 - c. Sikap untuk sekaku ingin memperbaiki kualitas hidup serta tidak puas diri
 - d. Sikap kebersamaan untuk memecahkan masalah dan tercapainya tujuan pembangunan
 - e. Sikap mandiri atau percaya diri atas kemampuan untuk memperbaiki kualitas hidupnya
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi
- Kemampuan mengandung arti :
- a. Kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan untuk membangun atau mempunyai pengetahuan untuk memperbaiki kualitas hidup)
 - b. Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan
 - c. Kemampuan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi dengan memanfaatkan sumberdaya dan peluang yang tersedia secara optimal
- Berdasarkan pendapat di atas maka menurut Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2013) upaya yang dilakukan dalam tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai berikut :
1. Pemberian kesempatan yang dilandasi pengertian bahwa masyarakat memiliki kemampuan dan kearifan tradisional berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidupnya
 2. Penyuluhan yang intensif dan berkelanjutan
 3. Penjelasan kepada masyarakat tentang besarnya manfaat ekonomi dan non ekonomi yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.
- Ndraha (2002) menyebutkan terdapat beberapa bentuk partisipasi dalam pembangunan, yaitu:
1. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain

sebagai salah satu titik awal perubahan sosial;

2. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya;
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan. Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditumbuhkan sedini mungkin di dalam masyarakat;
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan;
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauhmana pelaksanaan pembangunan sesuai rencana dan sejauhmana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

Sementara itu menurut Uphoff et al dalam Nasution (2009), menjelaskan bentuk partisipasi sebagai berikut :

1. Partisipasi dalam bentuk pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dimaksudkan untuk keputusan yang menyangkut rencana desa yang dapat dilihat dalam empat aspek, yaitu :

- a. Frekuensi menghadiri rapat desa yang khususnya membicarakan masalah rencana pembangunan masyarakat desa.
 - b. Tindakan yang dilakukan masyarakat dalam rapat-rapat desa, yang dapat berwujud mengikuti jalannya rapat dengan baik, menyumbangkan ide, gagasan, mengajukan usul atau saran dalam rapat desa, memberi tanggapan atau kritik terhadap masalah yang dibicarakan serta ikut memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan.
 - c. Memberikan data atau informasi dalam setiap pertemuan rapat pembangunan.
 - d. Keikutsertaan masyarakat dalam proses atau rumusan pembuatan keputusan.
2. Partisipasi dalam bentuk pelaksanaan kegiatan. Partisipasi dalam bentuk pelaksanaan kegiatan ini dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu:
 - a. Keikutsertaan secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan.
 - b. Keikutsertaan secara tidak langsung tetapi membantu secara sepenuhnya dalam pelaksanaan pembangunan melalui sumbangan material, dan sumbangan dana atau biaya.
 3. Partisipasi dalam bentuk pemanfaatan hasil.

Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan serta menikmati hasil pembangunan desa, yakni:

- a. Ikut serta dalam memanfaatkan fasilitas umum seperti fasilitas sekolah, fasilitas klinik dan lain sebagainya.
 - b. Ikut serta dalam menikmati manfaat secara pribadi seperti merasa puas terhadap hasil pembangunan yang telah tercapai, merasa aman didalam hidup bermasyarakat, serta memperoleh kehidupan masa depan yang lebih baik.
4. Partisipasi dalam bentuk penilaian atau evaluasi. Partisipasi dalam bentuk penilaian hasil pembangunan desa dapat dilihat dalam tiga aspek, yaitu :
- a. Tanggapan masyarakat terhadap tindakan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan dan rumusan keputusan desa.
 - b. Tanggapan masyarakat terhadap tindakan pembangunan dengan rencana yang telah ditentukan baik dari segi waktu, biaya dan tempat.
 - c. Keterlibatan dalam menangani sesuai kebutuhan masyarakat desa.

Pendapat lain dari Sulaiman dalam Huraerah (2011), menyatakan bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, terdapat lima macam, yaitu :

1. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan
2. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka
3. Partisipasi representatif dengan memberikan kepercayaan dan mandate kepada wakil rakyat didalam organisasi atau panitia
4. Partisipasi dalam bentuk dukungan berupa keterlibatan mental emosional individu dan motivasi memberikan kontribusi dalam bentuk pikiran, tenaga, barang dan jasa untuk menentukan keberhasilan suatu pembangunan

KESIMPULAN

Dalam pembangunan desa, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari adanya kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan desa. Tujuan pembangunan desa tersebut untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa dalam arti masyarakat mempunyai kesadaran bahwa kegiatan pembangunan bukan hanya kewajiban dari pemerintah saja tetapi juga dituntut keterlibatan masyarakat untuk perbaikan kualitas hidupnya. Partisipasi masyarakat bisa juga dianggap sebagai tolok ukur dalam menilai apakah proyek yang bersangkutan merupakan proyek pembangunan desa atau bukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta. Graha Ilmu

- Huraerah, Abu. 2011. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung. Humaniora
- Khairuddin. 2003. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta. Liberty
- Marbun, B.N. 2002. *Proses Pembangunan Desa*. Jakarta. Erlangga
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung. AlfaBeta
- Nasikun. 2000. *Globalisasi dan Paradigma Baru Pembangunan Pariwisata Berbasis Komunitas dalam Fandell*, C dan Mukhlison (eds), Pengusahaan Ekowisata, Fakultas Kehutanan UGM dan Pustaka Pelajar
- Nasution, M. 2009. *Sistem Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta. Sajadah Net
- Ndraha, Taliziduhu. 2002. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta. Rineka Cipta
- Raharjo. 2004. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh*. The World Bank
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Aceh. Read
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta. PT Raja Grafinda Persada